

Nama : Novitria Amalia
NPM :2213031078
Kelas :22C
Mata Kuliah : Ekonomi Industri
Dosen Pengampu : Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd. Drs. Nurdin, M.Si. Meyta
Pritandari, S.Pd., M.Pd.

Indonesia sedang menghadapi tantangan deindustrialisasi dini, di mana kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menurun meskipun pendapatan per kapita belum mencapai level negara maju. Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah meluncurkan kebijakan *Making Indonesia 4.0* sebagai upaya revitalisasi industri nasional, dengan fokus pada lima sektor prioritas: makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia.

Namun, setelah lima tahun implementasi, pertumbuhan sektor-sektor tersebut belum signifikan. Sementara itu, negara-negara seperti Vietnam dan Bangladesh justru menunjukkan peningkatan pesat dalam sektor manufakturnya.

Pertanyaan:

1. Analisislah kemungkinan penyebab kegagalan implementasi kebijakan *Making Indonesia 4.0* dalam mendorong pertumbuhan industri prioritas. Gunakan teori-teori kebijakan industri sebagai dasar analisis Anda.
2. Bandingkan pendekatan kebijakan industri Indonesia dengan negara lain seperti Vietnam atau Korea Selatan. Apa yang membedakan efektivitas kebijakan mereka?
3. Berdasarkan hasil analisis Anda, rancanglah kebijakan industri alternatif yang lebih kontekstual untuk Indonesia agar mampu keluar dari jebakan deindustrialisasi dini. Jelaskan rasional dan instrumen kebijakan yang digunakan.

JAWABAN:

1. Penyebab Kegagalan Implementasi

Program *Making Indonesia 4.0* belum berhasil mendorong pertumbuhan industri secara signifikan karena terdapat ketidaksesuaian antara fokus kebijakan dan kondisi riil industri. Pemerintah lebih menekankan digitalisasi dan otomatisasi, sementara banyak industri masih menghadapi masalah dasar seperti biaya logistik tinggi, pasokan energi yang belum stabil, keterbatasan SDM terampil, serta lemahnya integrasi rantai nilai domestik. Akibatnya, adopsi teknologi tidak langsung meningkatkan produktivitas.

Selain itu, kebijakan ini cenderung terlalu umum dan tidak selektif. Penetapan banyak sektor prioritas tanpa diferensiasi tingkat kesiapan industri membuat insentif tidak tepat sasaran. Dari sisi kelembagaan, koordinasi antar kementerian masih lemah sehingga program berjalan terfragmentasi dan tanpa arah implementasi yang konsisten. Desain insentif juga kurang mengikat karena tidak disertai mekanisme evaluasi kinerja dan *sunset clause*.

2. Perbandingan dengan Vietnam dan Korea Selatan

Vietnam berhasil karena menerapkan strategi industrialisasi yang berorientasi ekspor dan agresif menarik investasi asing langsung (FDI). Pemerintah Vietnam menyediakan kawasan industri yang terhubung dengan pelabuhan serta memberikan kepastian regulasi bagi investor. Industrialisasinya bersifat bertahap, dimulai dari industri padat karya sebelum naik ke industri yang lebih kompleks.

Korea Selatan menunjukkan peran negara yang sangat kuat dalam mengarahkan investasi. Pemerintah secara selektif memilih sektor strategis, memberikan kredit terarah, serta menjaga konsistensi kebijakan jangka panjang. Berbeda dengan Indonesia, kebijakan industri kedua negara tersebut didukung institusi yang kuat dan konsisten.

3. Rancangan Kebijakan Alternatif untuk Indonesia

Indonesia memerlukan kebijakan industri yang lebih kontekstual dengan pendekatan berbasis kapabilitas. Fokus awal sebaiknya pada industri

pengolahan pangan, tekstil, dan elektronika perakitan yang sesuai dengan struktur tenaga kerja Indonesia.

Instrumen kebijakan yang disarankan meliputi pembangunan kawasan industri tematik, insentif berbasis kinerja, kredit murah untuk modernisasi mesin UMKM, penguatan pendidikan vokasi berbasis industri, serta kebijakan pengadaan pemerintah yang memprioritaskan produk dalam negeri. Selain itu, dibutuhkan lembaga khusus lintas kementerian yang memiliki kewenangan kuat untuk mengoordinasikan kebijakan industri.

Pendekatan ini lebih realistik karena mengutamakan penguatan fondasi industri sebelum mendorong transformasi digital secara luas